

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Usaha kecil mikro menengah yang biasa disebut dengan UMKM merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang mencakup kepentingan masyarakat. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penopang perekonomian bangsa. Kita bahkan tidak dapat menafikan peran besar UMKM dalam menekan pengangguran, menyediakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan membangun karakter bangsa melalui kewirausahaan.

UMKM di negara berkembang seperti Indonesia sering dikaitkan dengan masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya angka kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, proses pengembangan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya menanggulangi masalah-masalah tersebut.

Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang berskala kecil, yang dapat dikelola oleh sekumpulan keluarga maupun kelompok perorangan yang bertujuan untuk mendirikan sebuah usaha (Tambunan, 2020:119). Tingkat pertumbuhan UMKM di Indonesia mendapatkan perhatian oleh pemerintah dengan memberikan kemudahan untuk para pelaku usaha baik dari sektor permodalan maupun perpajakan. UMKM sangat memberikan kontribusi besar bagi perekonomian secara makro. Pada tahun 2020 jumlah UMKM yang tersebar diseluruh Indonesia sebanyak 26.422.256. Dari angka tersebut potensi yang sangat besar apabila usaha tersebut terus dikembangkan dan ditingkatkan sehingga memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Keberadaan UMKM untuk menumbuhkembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan (Alansori dan Listyaningsih 2020:3).

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, berperan penting dalam menyokong Produk Domestik Bruto (PDB) dengan kontribusi sekitar 60%. Sektor ini juga merupakan penyedia utama lapangan kerja, menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di

Indonesia. Dengan demikian, UMKM tidak hanya memperkuat ekonomi nasional, tetapi juga memainkan peran vital dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun kontribusi langsung UMKM terhadap pendapatan pajak pemerintah relatif kecil dibandingkan dengan perusahaan besar, sektor ini tetap memberikan dampak yang signifikan. UMKM berkontribusi melalui berbagai bentuk pajak dan retribusi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan pendapatan pemerintah. Pentingnya UMKM dalam konteks ekonomi mikro dan lokal membuat mereka sebagai fokus utama dalam perencanaan dan kebijakan fiskal.

Secara keseluruhan, peran UMKM tidak hanya terbatas pada kontribusi langsung terhadap pendapatan pemerintah tetapi juga pada dampak ekonomi yang lebih luas. Dengan mendukung UMKM, pemerintah dapat memperkuat basis ekonomi nasional, meningkatkan lapangan kerja, dan pada akhirnya mendukung pertumbuhan pendapatan melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kepatuhan pajak di seluruh sektor.

Melihat fenomena tersebut, persaingan yang ketat dan kompetitif seharusnya diimbangi dengan peningkatan kualitas dari setiap UMKM yang ada. Namun, sebagian UMKM di Indonesia terkendala dengan masalah pemberian modal kredit oleh Perbankan untuk mengembangkan usaha disebabkan karena kelayakan usaha, aspek keuangan, aspek laporan keuangan yang dihasilkan masih sangat minim karna rendahnya pengetahuan untuk membuat suatu laporan yang baik dan benar. Pada saat ini perkembangan UMKM masih menghadapi berbagai hambatan dalam menghadapi dunia usaha yang sangat ketat. Namun demikian dengan berbagai keterbatasan yang ada, UMKM masih diharapkan mampu sebagai andalan perekonomian bangsa.

Selain minimnya pengetahuan tentang laporan, regulasi lain yang kerap diabaikan oleh pelaku UMKM adalah soal pembayaran pajak. Dari sekitar 60 juta pelaku UMKM di Indonesia, hanya 2,5% saja atau sekitar 1,5 juta pelaku UMKM yang melaporkan pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pelaku UMKM paham akan cara menghitung pajak yang menjadi kewajiban mereka. Efek terburuk yang bisa menimpa pelaku UMKM adalah usaha mereka bisa mengalami gulung tikar karena modal yang ada habis dipakai untuk membayar sanksi pajak yang telat dibayarkan.

Fenomena lain yang sering terjadi yaitu UMKM sering menghadapi sejumlah masalah dalam pemasaran yang mempengaruhi pertumbuhan dan daya saing mereka. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya dan anggaran, yang membatasi kemampuan mereka untuk melakukan pemasaran secara luas dan efektif. Selain itu, banyak pemilik UMKM tidak memiliki keahlian pemasaran yang memadai, sehingga mereka kesulitan menerapkan strategi yang tepat dan melakukan analisis pasar yang mendalam. Masalah lain adalah kesulitan dalam membangun merek dan diferensiasi di pasar yang kompetitif, di mana keterbatasan kreativitas dan visibilitas dapat menghambat upaya mereka untuk menarik dan mempertahankan pelanggan.

Berkaitan dengan masalah masalah yang dihadapi oleh UMKM, aspek keuangan yang meliputi laporan keuangan yang masih sangat minim di ketahui oleh pelaku UMKM. Laporan keuangan merupakan output proses akuntansi dalam menyediakan informasi keuangan dalam suatu usaha. Laporan keuangan digunakan sebagai rangkuman finansial sebuah usaha. Semakin meningkatnya sebuah usaha, UMKM dituntut untuk mempunyai sebuah laporan keuangan yang baik dan benar. Digunakan sebagai peningkatan permodalan untuk usaha. Contoh mengajukan pinjaman modal ke perbankan. Sehingga dana modal lebih mudah untuk disetujui karena laporan keuangan yang lengkap serta jelas.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menerbitkan laporan standar untuk menyusun sebuah laporan keuangan yang disebut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang kini sudah menjadi SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang digunakan sebagai standar memuat prosedur penyusunan laporan keuangan.

Di Indonesia SAK yang digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan UMKM yaitu SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) yang di Sahkan pada tahun 2009 bertujuan untuk memudahkan UMKM dalam menyajikan laporan keuangan. Serta menjadi solusi masalah untuk UMKM yang sedang dihadapi.

Namun dengan berjalannya waktu ternyata SAK ETAP sangat banyak kekurangannya, yaitu Prinsip pengungkapan yang terlalu terbatas sehingga kurang mendetail beberapa informasi dalam laporan keuangan. kurangnya pengetahuan serta ilmu yang dimiliki oleh pelaku UMKM yang membuat standar laporan keuangan tersebut kurang diminati dan tidak digunakan. Dengan terus berjalannya waktu, serta perkembangan UMKM yang semakin berkembang. Maka Ikatan Akuntansi

Indonesia membuat kebijakan baru untuk standar menyusun laporan keuangan yang lebih sederhana yaitu SAK EMKM adalah standar akuntansi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Laporan Keuangan pada SAK EMKM hanya meliputi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. dengan dibentuknya standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan , sehingga akan memudahkan upaya pengembangan entitas ke depannya.

UMKM yang diteliti oleh penulis yaitu UD Raditya Jaya bergerak dibidang usaha sewa dan rental Scaffolding, Molen, Vibrator, dan Stamper. Usaha keluarga yang sudah berdiri 6 tahun lamanya yang berlokasi di jl RTM Kelapa Dua Depok. UMKM tersebut belum menggunakan sistem penerapan SAK EMKM yang berlaku.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk merancang serta mengimplementasikan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM, maka peneliti mengambil judul **“Rancangan dan Implementasi Laporan Keuangan sesuai SAK EMKM pada UMKM (Studi kasus pada UD Raditya Jaya tahun 2023) “**.

1.2. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang muncul, dapat diidentifikasi oleh penulis sebagai berikut:

1. Pelaku UMKM tidak begitu peduli dengan laporan keuangan, bagi mereka laporan keuangan hanya merepotkan padahal laporan keuangan sangat penting untuk mengetahui sukses atau tidaknya sebuah bisnis.
2. Minimnya pengetahuan serta informasi karena rata- rata pelaku UMKM adalah orang-orang yang baru mulai merintis usaha.
3. Kurangnya sosialisasi tentang pengetahuan laporan keuangan kepada pelaku UMKM sehingga amat sangat sulit untuk menerapkan sistem standar akuntansi yang berlaku.
4. Sulitnya UMKM untuk mengajukan peminjaman modal kepada Lembaga keuangan disebabkan karena tidak ada laporan keuangan yang jelas.
5. keterbatasan sumber daya dan anggaran, yang membatasi kemampuan mereka untuk melakukan pemasaran secara luas dan efektif.

1.3. Batasan Masalah.

Untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah jelas, maka peneliti memberikan Batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini akan fokus kepada laporan UMK yang masih kesulitan membuat laporan sesuai SAK EMKM pada UMKM
2. Penelitian ini akan fokus kepada SAK yang sangat membantu UMKM terutama dalam memudahkan dalam meminjam modal kepada Lembaga keuangan.
3. UMKM yang dipilih yaitu UMKM yang fokus usaha dalam skala kecil serta sudah memiliki laporan keuangan yang sederhana.

1.4. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah-masalah yang diangkat dalam penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan yang meliputi:

1. Bagaimana Rancangan Laporan Keuangan UMKM sesuai dengan SAK-EMKM UD Raditya Jaya tahun 2023?
2. Bagaimana Implementasi sesuai Laporan Keuangan UMKM sesuai dengan SAK-EMKM UD Raditya Jaya tahun 2023?

1.5. Tujuan Penelitian.

Melihat rumusan masalah diatas maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan,yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Untuk merancang Laporan Keuangan sesuai dengan SAK-EMKM yang berlaku.
2. Untuk mengimplementasikan sesuai Laporan Keuangan sesuai dengan SAK-EMKM

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak seperti:

1. Bagi Peneliti
Peneliti memperoleh manfaat penambahan pengetahuan dan wawasan mengenai Laporan Keuangan SAK EMKM pada UMKM.
2. Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan bahan referensi dalam pengembangan penelitian yang lebih baik lagi.
3. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi UMKM

1.7. Sistematika Penulisan.

Guna memahami lebih lanjut laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub-bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang,identifikasi masalah,pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu yang sejenis, kerangka pemikiran penelitian, dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, Teknik pengumpulan data, definisi opsional variable dan Teknik analisis data penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab hasil dan pembahasan berisi tentang gambaran umum objek penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN

Menjelaskan kesimpulan penelitian dan saran yang diberikan berkaitan dengan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang buku, jurnal, rujukan yang secara sah digunakan dalam penyusunan penelitian.